

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prinsip Dasar Ekonomi Sumber Daya Ikan

Ikan merupakan salah satu komoditi yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Di negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Peru, produksi dari perikanan selain bisa digunakan konsumsi pemenuhan kebutuhan protein hewani, juga merupakan sumber penghasilan negara (devisa) berupa ekspor. Perikanan, seperti halnya sektor ekonomi lainnya, merupakan salah satu aktivitas yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan suatu bangsa. Sebagai salah satu sumber daya alam yang bersifat dapat diperbarui (*renewable*), pengelolaan sumber daya ini memerlukan pendekatan yang bersifat menyeluruh dan hati-hati. Pada mulanya, pengelolaan sumber daya ini banyak didasarkan pada faktor biologis semata, dengan pendekatan yang disebut *Maximum Sustainable Yield* (tangkapan maksimum yang lestari) atau disingkat *MSY*. Dalam pendekatan ini menjelaskan bahwa setiap spesies ikan memiliki kemampuan untuk memproduksi yang melebihi kapasitas produksi (*surplus*), sehingga apabila *surplus* ini dipanen (tidak lebih dan tidak kurang), maka stok ikan mampu bertahan secara berkesinambungan (*sustainable*). Dengan tercapainya tingkat *MSY* maka akan tercapai produksi yang maksimum secara ekonomi dan merupakan tingkat upaya yang optimal secara sosial (Fauzi, 2008: 98).

2.2 Masalah Pembangunan Perikanan

Permasalahan pembangunan perikanan dalam hal ini, didefinisikan sebagai segenap perbedaan (kesenjangan) antara kondisi yang diinginkan dengan kenyataan yang terjadi. Kondisi pembangunan perikanan Indonesia yang diinginkan adalah suatu pembangunan perikanan yang dapat memanfaatkan sumber daya perikanan beserta ekosistem perairannya untuk kesejahteraan umat manusia, terutama nelayan dan petani ikan secara berkelanjutan (*on sustainable basis*). Ada lima tujuan yang harus dicapai oleh pembangunan perikanan nasional, yaitu (Mulyadi, 2007: 28):

- (1) Pemenuhan kebutuhan konsumsi produk perikanan untuk dalam negeri
- (2) Peningkatan perolehan devisa
- (3) Peningkatan produksi perikanan sesuai dengan potensi lestari dan daya dukung lingkungan
- (4) Pemeliharaan kelestarian stok ikan dan daya dukung lingkungannya
- (5) Peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani ikan

Kinerja pembangunan perikanan masih jauh dari harapan. Dikatakan demikian karena nelayan dan petani ikan sebagian masih merupakan penduduk miskin, perolehan devisa yang relatif masih kecil, sumbangan terhadap PDB nasional yang masih relatif kecil, sementara beberapa stok ikan di beberapa kawasan perairan sudah mengalami kondisi tangkap lebih (*overfishing*). Hal tersebut dapat terjadi terutama dikarenakan pengelolaan pembangunan yang

selama ini diterapkan kurang besar. Dengan kata lain, selama ini telah terjadi *mis-management* pada pembangunan nasional (Dahuri, 2000: 13).

Kelemahan dalam pengelolaan pembangunan perikanan dapat dikelompokkan menjadi empat (Mulyadi, 2007: 29), yaitu:

- (1) Bersifat teknis
- (2) Berkaitan dengan kebijakan
- (3) Berkaitan dengan aspek hukum dan kelembagaan
- (4) Kondisi ekonomi politik (kebijakan ekonomi makro) yang kurang kondusif bagi pembangunan perikanan

2.2.1 Permasalahan Yang Bersifat Teknis

Permasalahan pembangunan perikanan di Indonesia yang bersifat teknis meliputi hal berikut (Mulyadi, 2007: 30). *Pertama*, kemampuan dalam memproduksi komoditas perikanan yang berdaya saing tinggi secara lestari (berkesinambungan), baik melalui usaha penangkapan maupun usaha budi daya masih rendah. Hasil tangkapan ikan per satuan upaya (per perahu atau per nelayan) di laut masih relatif, bersifat fluktuatif atau tak menentu (*uncertain*). *Kedua*, kemampuan dalam memasarkan komoditas perikanan dengan harga yang menguntungkan baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor masih juga lemah. Harga jual produk perikanan sangat cepat berubah, dan sering mengalami *market glut*, yakni suatu kondisi pasar yang harga jual suatu komoditasnya menurun dratis ketika pasokan (*supply*) komoditas tersebut melimpah dan harga jual

membalik manakala pasokannya kecil (sedang paceklik). *Ketiga*, harga faktor-faktor produksi (*production inputs*) seperti bahan bakar, alat tangkap, mesin kapal, dan lainnya relatif mahal dan bersifat fluktuatif.

2.2.2 Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Kebijakan

Sampai saat ini kebijakan pemerintah di bidang agrobisnis perikanan dinilai secara umum belum mendukung kemajuan pembangunan perikanan. Minimal ada tiga kelemahan kebijakan yang mendasar (Mulyadi, 2007: 31). *Pertama*, belum ada kebijakan yang membatasi jumlah (*quota*) penangkapan stok ikan di suatu kawasan perairan (laut). Semua nelayan secara bebas dapat menangkap ikan di suatu wilayah perairan. Akibatnya terjadi *overfishing* yang pada gilirannya merugikan usaha perikanan tangkap dan nelayan menjadi miskin. *Kedua*, belum ada tata ruang yang mengakomodasi lahan usaha budi daya perikanan sebagai kawasan khusus/tertentu yang mendapat perlindungan dari konversi dan bahaya pencemaran, serta pengaturan penjarangan (*spacing*) usaha budi daya perikanan di suatu kawasan. *Ketiga*, belum ada kebijakan tentang kredit murah dan lunak, misalkan bunga sekitar sepuluh persen seperti KUT (Koperasi Usaha Tangkap), untuk mendukung usaha perikanan tangkap, budi daya ataupun industri pengolahan.

2.2.3 Permasalahan Berkaitan Dengan Aspek Hukum dan Kelembagaan

Instrumen hukum dan kelembagaan yang memadai diperlukan untuk dapat menerapkan kebijakan pembangunan perikanan. Implementasi dan penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang perikanan di Indonesia dinilai masih rendah. Sanksi hukum bagi perusak lingkungan belumlah cukup membuat perusak menjadi jera. Ironisnya kegiatan yang bersifat destruktif ini tidak hanya dilakukan oleh nelayan tradisional, tetapi juga nelayan asing yang banyak melakukan kegiatan pencurian ikan di perairan nusantara. Ini merupakan bukti lemahnya hukum dalam menegakkan keadilan di sektor perikanan (Mulyadi, 2007: 32). Pada sisi kelembagaan, permasalahannya adalah sampai saat ini belum ada kelembagaan perikanan yang mengakomodasi kekompleksan dan kerumitan permasalahan yang ada dalam pembangunan perikanan, artinya kelembagaan setingkat Ditjend (Direktorat Jendral) terlalu kecil untuk mengurus kompleksitas permasalahan pembangunan perikanan yang ada. Permasalahan lain dalam masalah kelembagaan perikanan adalah panjangnya birokrasi yang harus dilalui dalam proses perizinan sehingga proses pembangunan perikanan yang sedang berjalan bersifat tidak efisien dan ekonomi biaya tinggi.

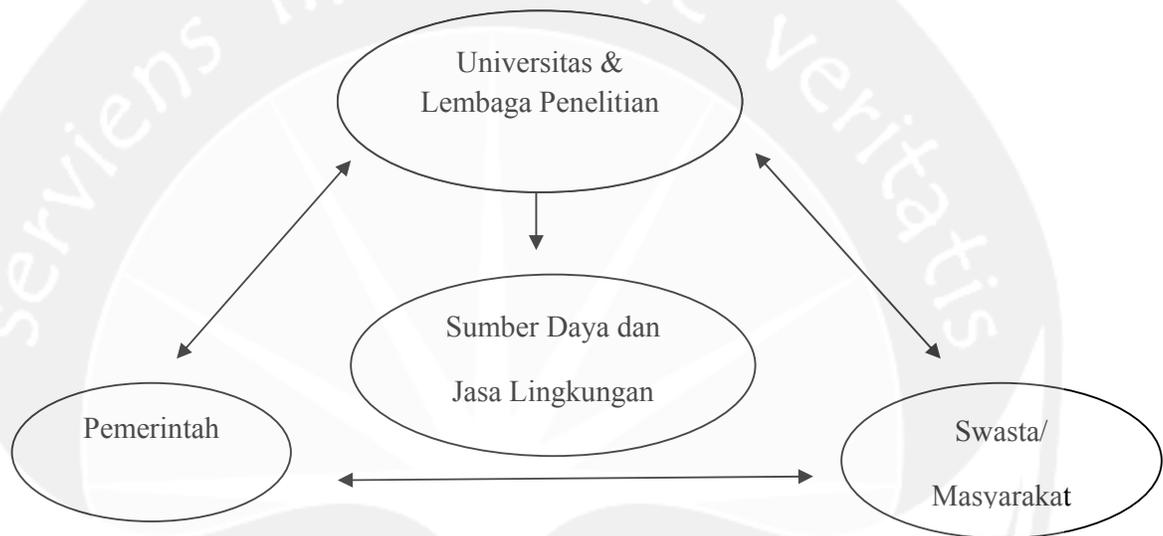
2.2.4 Permasalahan Berkaitan Dengan Kondisi Ekonomi Politik

Meskipun potensi pembangunan perikanan Indonesia sangat besar dan sumbangannya terhadap perekonomian nasional pun tidak kecil (berupa penyediaan protein hewani, perolehan devisa, penyerapan tenaga kerja, pengembangan wilayah, dan *multiplier effects* lainnya), tetapi pada kenyataannya perikanan kurang mendapat perhatian dari para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan baik di kalangan pemerintah maupun swasta. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan fakta bahwa wacana ekonomi politik masih belum mendukung kemajuan pembangunan, yaitu sebagai berikut (Mulyadi, 2007: 33). *Pertama*, di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai arahan kebijakan pembangunan nasional sekaligus representasi kemajuan politik pemerintah dalam mengatur negara, hanya di muat aspek pembangunan sektor kelautan yang tidak terfokus pada pembangunan perikanan. *Kedua*, sampai saat ini pembangunan perikanan masih kurang menarik jika dibandingkan sektor lain dalam kebijakan investasi.

2.3 Strategi Pengelolaan dan Prioritas Program Perikanan

Dalam rangka mempercepat proses pemanfaatan dan pembangunan sektor kelautan maka perlu kiranya disusun strategi pengelolaan yang tepat sasaran dan *cost-effective*. Strategi yang diusulkan adalah pemberdayaan jaringan kerja yang melibatkan unsur universitas, pemerintah dan swasta/pribadi (Lihat gambar 2.1).

Program kemitraan sangat diperlukan dengan jaringan dan kinerja yang kuat dari pihak tersebut secara optimal. Integrasi ke tiga unsur ini jelas merupakan resep keberhasilan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya dan memacu pembangunan kelautan.



Sumber: Apridar (2010: 102)

Gambar 2.1
Jaringan Kerja Universitas/Lembaga Penelitian,
Swasta/Masyarakat dan Pemerintah

Pemberdayaan jaringan kerja ini dapat dimulai diwujudkan dalam bentuk berbagi (sharing) informasi yang ada. Dalam melakukan pemberdayaan jaringan kerja ini dengan membentuk semacam konsorsium pengelolaan kapal-kapal riset dan laboratorium kelautan yang ada di Universitas atau lembaga penelitian. Tugas konsorsium adalah menggalakkan, mengembangkan dan mengkoordinasikan kerja sama antar universitas atau lembaga penelitian sehingga biaya penelitian dan

pengkajian sumberdaya dan jasa maritim dapat lebih *cost-effective*, dalam arti biaya yang efisiensi dan hasil yang memadai. Selain itu konsorsium juga diharapkan menjalin kerjasama dengan pihak swasta terutama dalam mengembangkan sumberdaya manusia, pemantauan pemanfaatan sumberdaya dan jasa yang dikerjakan atau dikembangkan. Dengan adanya mekanisme pemantauan maka pengelolaan sumberdaya dan jasa maritim dapat dilakukan secara dinamis dan efektif. Hasil-hasil pemantauan kemudian diinformasikan ke pihak pemerintah sebagai bahan untuk revisi kebijakan sekiranya memang diperlukan. Untuk perguruan tinggi dan masyarakat hendaknya dijadikan penggerak pengembangan kawasan melalui berbagai program antara lain “*land and sea grant college*”.

Disisi sumberdaya, salah satu program yang perlu diprioritaskan adalah pengembangan sistem budidaya laut (marikultur) yang terintegrasi. Prioritas program yang mampu memberikan sumbangan terhadap ekonomi nasional berbasis maritim adalah pengembangan armada transportasi laut dan perikanan. Hal ini sangat mendesak mengingat ketimpangan besar yang terjadi dalam dua jenis industri ini. Transportasi laut adalah urat nadi perekonomian yang berbasis maritim yang perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Sejalan dengan pengembangan armada ini adalah pembuatan galangan kapal serta fasilitas *docking*.

Pembangunan ekonomi berbasis maritim secara sederhana dapat dikelompokkan dalam dua baris pengembangan, pertama, pembangunan yang memanfaatkan sumberdaya (*resources*) yang ada di laut. Kedua adalah jasa (*service*).

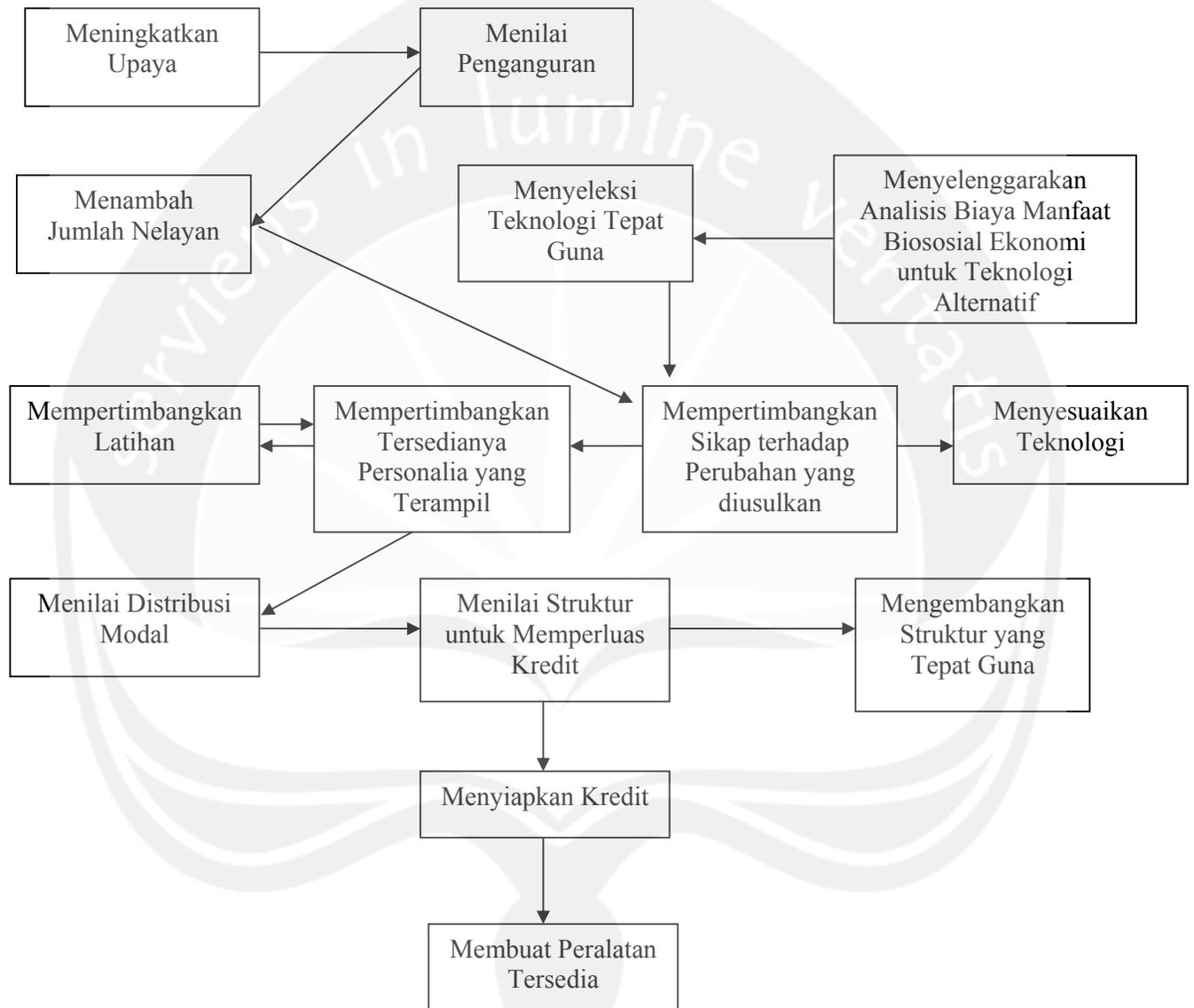
2.4 Pengembangan Program Perikanan

Sering kali dianggap bahwa ekonomi sumber daya dan ahli biologi dapat menentukan perubahan-perubahan tertentu pada perikanan. Kadang-kadang perubahan ini meliputi pula rencana pengelolaan, misalnya, mengurangi penangkapan secara keseluruhan untuk meningkatkan potensi sumber daya ikan. Dalam melakukan pengurangan hasil tangkapan, perlunya dipelajari analisis biaya manfaat biososial-ekonomi oleh nelayan.

Gambar 2.2 berikut menunjukkan bahwa sikap para nelayan yang akan mengalami perubahan yang diusulkan harus betul-betul diperhatikan. Teknologi baru tidak dapat diperkenalkan ke dalam industri penangkapan ikan kecuali nelayan ingin berubah. Jika nelayan menolak bekerja sama, proyek tidak akan berhasil. Apabila sikapnya positif, keberhasilan dalam mengenalkan teknologi baru atau semakin banyak nelayan yang tergantung pada adanya personalia yang terampil. Apabila tenaga terampil kurang, suatu program tepat guna harus dikembangkan untuk melatih nelayan dalam teknologi baru. Apabila tenaga terampil cukup tersedia, rintangan antara nelayan dan teknologi penangkapan adalah kemampuan untuk membiayai perubahan. Apabila sumber daya berupa uang tidak memadai, keputusan harus diambil untuk keperluan penyuluhan kredit.

Masalah lain dalam perluasan kredit menyangkut respons nelayan terhadap sumber pinjaman yang bersifat segera. Di kebanyakan masyarakat nelayan selalu menganggap bahwa bantuan kredit yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan pemberian dan tidak harus dibayar kembali. Keputusan selain memperluas kredit untuk para nelayan yaitu mendirikan organisasi produsen, seperti koperasi yang

akan memiliki peralatan dan nelayan anggota akan membayar suatu bagian dari tangkapannya pada organisasi sebagai biaya pemakaian dan perawatan alat.



Sumber: Mulyadi (2007: 65)

Gambar 2.2
Pokok-pokok Keputusan untuk Meningkatkan
Upaya Penangkapan Ikan

2.5 Kebijakan Pemerintah dan Pembiayaan Usaha Perikanan

Salah satu akar kemiskinan masyarakat pantai adalah keterbatasan mengakses permodalan yang ditunjang oleh kultur kewirausahaan yang tidak kondusif yang dilandasi dengan sifat usaha yang individual, tradisional dan subsisten. Kebijakan pemerintah dalam upaya pembiayaan usaha mikro-kecil bidang kelautan dan perikanan (Mulyadi, 2007: 139) yaitu sebagai berikut.

2.5.1 Program PPEM

PPEM merupakan singkatan dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terlibat pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan. Demikian pula pada pascaprogram, mereka bersama-sama dengan pemerintah daerah dan mitra usaha diberikan tanggung jawab mengembangkan usaha yang telah dipiuhnya. Usaha yang didanai dan dikembangkan dalam program PPEM diprioritaskan pada jenis usaha yang dapat memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut serta usaha lainnya yang terkait. Jenis usaha tersebut antara lain adalah usaha penangkapan, budi daya, pengolahan hasil perikanan, pengadaan bahan dan alat perikanan, BBM, es, serta obat-obatan. Model pengembangan usaha dan permodalan yang disarankan untuk diaplikasikan pada program PPEM adalah model bagi hasil yang digabung dengan perguliran. *Revolving* (perguliran) dilakukan setelah ada keuntungan dan usaha kelompok telah kuat. Dana yang digulirkan bukan berasal dari modal pokok melainkan dari keuntungan yang telah diperoleh kelompok.

Melalui program PPEM diharapkan masyarakat nelayan dapat meningkatkan pendapatan mereka.

2.5.2 Program COFISH

COFISH merupakan proyek pembangunan masyarakat pantai dan pengelolaan sumber daya perikanan yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan pantai dengan cara mengurangi kegiatan penangkapan ikan yang merusak dan berlebihan, memperbaiki mutu sumber daya perikanan serta habitatnya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat pantai, termasuk wanita nelayan, melalui pengurangan kemiskinan dalam jangka panjang serta peningkatan pendapatan. Program ini melanjutkan implementasi dari beberapa kegiatan periode sebelumnya seperti penguatan pengawasan, identifikasi rehabilitasi bakau dan lokasi *fish sanctuary* perencanaan pendirian terumbu karang buatan dan persyaratan bimbingan teknis terhadap kelompok usaha mikro.

2.5.3 Program PUPTSK

PUPTSK merupakan singkatan dari Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil. Program PUPTSK berorientasi pada upaya untuk memberdayakan nelayan kecil, menengah beserta anggotanya di lokasi penangkapan dan desa-desa konsentrasi di wilayah dinas perikanan dan kelautan kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia untuk meningkatkan produksi dan produktivitas yang

optimal, meningkatkan mutu dan pengolahan ikan, pemasaran dan meningkatkan penyelenggaraan di lokasi penangkapan ikan serta melaksanakan usaha penangkapan yang bertanggung jawab. Program PUPTSK tersebar di seluruh provinsi, dan mulai tahun 2003 dilakukan di tujuh lokasi *pilot project* pelabuhan perikanan.

2.5.4 Program KUB

Kelompok Usaha Bersama (KUB) perikanan adalah suatu kelompok yang melakukan kegiatan usaha di bidang perikanan berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh kepentingan, kebutuhan dan keinginan bersama, untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan bersama. Tujuan KUB perikanan adalah meningkatkan kemampuan usaha secara bersama dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan anggota.

2.5.5 Partisipasi Lembaga Keuangan

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) melakukan kerjasama dengan berbagai macam lembaga keuangan. DKP bekerjasama dengan PT Bank Bukopin berkaitan dengan tindak lanjut program PPEM di masa yang akan datang. Setelah program PPEM ini berjalan kurang lebih sampai empat tahun, langkah-langkah konkret yang akan dilaksanakan adalah meningkatkan dan memperluas peran LEPP-M3 (Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir - Mikro Mitra-Mina) dalam perguliran permodalan di tengah nelayan. DKP menggandeng Menteri Negara Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah, Bank Bukopin, dan Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI) untuk mendorong pembentukan lembaga keuangan mikro secara mandiri dan profesional. Tindak lanjut dari kegiatan ini pembentukan Swamitra Mina di 130 Kabupaten/Kota peserta PPEM.

DKP dengan PT Permodalan Nasional Mandiri (PT PNM) bekerja sama dalam rencana pendirian tiga puluh Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam hal ini, PT PNM berperan untuk memberikan tambahan modal bagi operasionalisasi BPR tersebut, selain juga menangani jasa manajemen pendirian BPR. Selain itu, program kerja sama antara PT Bank Mandiri dengan Departemen Kelautan dan Perikanan dengan nama Kredit Mina Mandiri (KMM) ini dilaksanakan dalam upaya untuk penyediaan modal usaha masyarakat pesisir terutama segmen menengah ke atas. Disamping itu DKP melakukan kerjasama dengan PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrimindo). Fungsi dan peranan PT Askrimindo adalah untuk membantu UKM dalam memperoleh akses sumber pendanaan dari perbankan dan juga memberikan pengamanan atas kredit tersebut.

2.6 Analisis Ekonomi Usaha Nelayan

Keadaan ekonomi usaha-usaha nelayan dapat ditelaah berdasarkan analisis mikro ekonomi usaha-usaha nelayan. Sebagai satuan usaha, nelayan diambil satu unit penangkap. Bagi usaha-usaha perikanan besar yang mempunyai beberapa unit penangkap, analisis tersebut didasarkan unit usaha. Akan tetapi, karena data-data

yang lengkap dari perusahaan-perusahaan besar tidak diperoleh, analisis berdasarkan unit perusahaan tidak dapat dilakukan sehingga penilaian terhadap keadaan ekonomi dan efisiensi usaha-usaha perikanan hanya didasarkan pada analisis satu unit penangkap (Mulyadi, 2007: 85).

2.6.1 Modal Usaha Nelayan

Nilai aset tetap/tidak bergerak dalam satu unit penangkap disebut juga sebagai modal. Pada umumnya, untuk satu unit penangkap modal terdiri dari: alat-alat penangkap (pukat dan lain-lain), boat atau sampan penangkap, alat-alat pengolahan atau pengawet di dalam kapal, dan alat-alat pengangkutan laut. Penilaian terhadap modal usaha nelayan dapat dilakukan menurut tiga cara. *Pertama*, penilaian didasarkan kepada nilai alat-alat yang baru, yaitu berupa ongkos memperoleh alat-alat tersebut menurut harga yang berlaku sekarang. Jadi, dengan mengetahui jenis-jenis alat dan jumlahnya beserta harganya yang baru dapatlah dihitung besar modal sekarang. *Kedua*, berdasarkan harga pembelian atau pembuatan alat-alat, jadi berapa investasi awal yang telah dilaksanakan nelayan, bertolak dari sini, dengan memperhitungkan penyusutan tiap tahun, dapat dihitung nilai alat-alat atau modal pada waktu sekarang. *Ketiga*, dengan menaksir nilai alat pada waktu sekarang, yakni harga yang akan diperoleh apabila alat-alat di jual.

2.6.2 Biaya Produksi Perikanan

Biaya produksi dalam usaha perikanan tangkap terdiri dari dua katagori, yaitu biaya berupa pengeluaran nyata (*actual cost*) dan biaya yang tidak merupakan nyata (*inputed cost*). Dalam hal ini, pengeluaran nyata terdiri dari pengeluaran kontan dan pengeluaran tidak kontan. Pengeluaran kontan diantaranya adalah untuk membeli bahan bakar dan oli, bahan pengawet (es dan garam), pengeluaran untuk makan awak, pengeluaran untuk reparasi dan pengeluaran retribusi dan pajak. Pengeluaran-pengeluaran tidak kontan adalah upah awak nelayan, pekerjaan yang umumnya bersifat bagi hasil dan dibayar setelah hasil dijual. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak nyata adalah penyusutan dari boat/sampan, mesin-mesin dan alat penangkap.

2.6.3 Pendapatan Nelayan dan Sistem Bagi Hasil

Pada umumnya, pendapatan para nelayan penggarap ditentukan secara bagi hasil dan jarang diterima sistem upah/gaji tetap yang diterima oleh nelayan. Dalam sistem bagi hasil, bagian yang dibagi ialah pendapatan setelah dikurangi ongkos-ongkos eksploitasi yang dikeluarkan pada waktu beroperasi ditambah dengan ongkos penjualan hasil. Jadi, di sini termasuk ongkos bahan bakar, oli, es dan garam, biaya makan awak kapal, dan pembayaran retribusi. Biaya lain yang termasuk ongkos eksploitasi seperti biaya reparasi adalah tanggungan dari pemilik alat dan boat. Dalam hal

bagi hasil yang dibagi adalah hasil penjualan ikan hasil tangkapan. Caranya ialah ikan hasil tangkapan satu unit penangkapan dijual oleh pemilik kemudian barulah dilakukan perhitungan bagi hasil.

2.7 Tantangan dan Peluang Pembangunan Perikanan

Pembangunan perikanan diperhadapkan pada beberapa tantangan antara lain adalah perdagangan bebas (*free trade*). Perdagangan bebas yang dihembuskan oleh kaum kapitalis negara-negara maju ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, menyimpan peluang (*opportunities*) yang sangat besar karena penurunan hambatan tarif dan nontarif yang selama ini menjegal produk pertanian dan perikanan dari negara-negara berkembang seperti Asia dan Afrika ke pasar internasional. Di sisi lain, perdagangan bebas menjadi ancaman (*treath*) karena dapat menjadi media baru bagi penyeluruhan hegemoni ekonomi-politik negara maju (*core*) atas negara setengah maju (*semiperyphery*) dan negara sedang berkembang (*peryhery*), seperti pemaksaan penghapusan subsidi dan melakukan proteksi produk. Di sisi lain, peluang untuk pembangunan bangsa melalui pendayagunaan sektor perikanan dan kelautan sangat besar karena kebutuhan terhadap bahan pangan baik nasional maupun internasional akan selalu meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk. Keadaan tersebut memberikan peluang dan harapan yang sangat besar bagi *stake holders* masyarakat perikanan, dari pemerintah selaku *policy maker* hingga nelayan untuk selalu melakukan pemanfaatan dan pencarian sumber bahan pangan yang bergizi dan berprotein tinggi dengan biaya relatif murah (Apridar, 2010: 113).

2.8 Studi Terkait

Abdurrahman, dkk (2008) melakukan penelitian berjudul Model Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Bantul Ditinjau dari Perspektif Ekonomi dan Hukum. Mereka memfokuskan persentase kemampuan produksi para nelayan dalam menangkap ikan, menganalisis kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi tangkap ikan oleh para nelayan Bantul. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur efektifitas instrumen kebijakan yang dilakukan dalam mengatasi persoalan kesejahteraan nelayan. Kebijakan regulasi masih mengacu kepada Perundang-undangan di tingkat Pusat. Pada level teknis yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan hanya bersifat sebagai mediator dalam pelaksanaan program-program pemerintah Pusat.

Mahiswara, dkk (1987) melakukan penelitian yang berjudul Suatu Analisis Pengaruh Faktor Produksi Terhadap Produksi Pukat Cincin di Prigi, Jawa Timur. Penelitian ini membahas usaha peningkatan produksi perikanan laut dengan menggunakan alat tangkap paling produktif yaitu pukat cincin. Keberhasilan pengoperasian pukat cincin ditentukan oleh faktor-faktor produksi yang mendukungnya. Dalam kasus perikanan pukat cincin di Prigi faktor produksi yang dimaksud adalah kecepatan kapal, panjang jaring, jumlah tenaga kerja dan jumlah trip/bulan. Kecepatan kapal sangat berpengaruh terhadap produksi. Hal ini diperlukan kecepatan yang ideal sesuai dengan ukuran kapal. Pengaruh panjang jaring terhadap produksi adalah secara bersama-sama dengan kedalaman jaring menentukan luasan areal gerombolan ikan yang dilingkari. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk pengoperasian pukat cincin tergantung pada ukuran

panjang jaring dan kemampuan/daya muat kapal. Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan akan semakin cepat penarikan jaring. Jumlah trip merupakan faktor penentu untuk produksi unit penangkapan. Perubahan musim, kondisi lingkungan dan sifat biologis ikan akan sangat berpengaruh terhadap jumlah trip.

Syauta (1998) melakukan penelitian yang berjudul Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Aplikasi Motorisasi Penangkapan (Studi Kasus di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku). Dalam penelitiannya menjelaskan mengenai keberhasilan nelayan dalam mengaplikasikan motorisasi penangkapan. Tingkat aplikasi motorisasi ditentukan berdasarkan peningkatan dan pengembangan usaha penangkapan ikan tradisional, melingkupi kesatuan dari aspek kemampuan kapal bermotor, kemampuan nelayan, hasil yang dicapai dan kepuasan nelayan terhadap sistem manajerial yang diterapkan pengusaha. Ketersediaan sarana dan prasarana ditunjang dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang memberikan kemudahan kepada nelayan dan pengusaha guna memperoleh dan memanfaatkannya. Hal ini dilakukan mengingat potensi pengembangan usaha motorisasi memiliki prospek yang baik. Aplikasi motorisasi penangkapan di Kecamatan Salahutu mempunyai hubungan yang nyata dengan pendapatan nelayan. Semakin tinggi aplikasi motorisasi penangkapan, semakin tinggi pendapatan nelayan.

Susilowati (1993) dalam penelitiannya yang berjudul Telaah Usaha Perikanan Pukat Cincin di Muncar, Jawa Timur. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa alat pukat cincin mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi yaitu bertambah besarnya ukuran perahu maupun panjang jaring yang

digunakan. Hal ini mengakibatkan tumbuhnya usaha pengolahan ikan di Muncar, baik berupa usaha rumah tangga maupun pabrik pengolahan tepung ikan. Bertambahnya unit-unit penangkapan baru dengan ukuran kapal yang lebih besar selain mencerminkan adanya pengembangan usaha juga mampu menyerap tenaga kerja dari desa-desa pantai di Kecamatan Muncar. Untuk meningkatkan mutu produk ikan olahan maka, bagi produk yang mempunyai prospek baik di pasaran internasional dan domestik perlu peningkatan mutu serta pengawasan yang berkesinambungan terhadap mutu yang sudah ada standardnya. Aktivitas di Muncar sangat didukung oleh anggota rumah tangga nelayan yang aktif melakukan kegiatan di bidang pengolahan perikanan tangkap. Kegiatan yang dilakukan antara lain, usaha pemindangan tradisional, usaha penepungan ikan tradisional, usaha pengolahan minyak lemuru tradisional dan pengolahan petis lemuru. Tumbuhnya usaha pengelolaan ikan di Muncar, baik berupa usaha rumah tangga maupun pabrik-pabrik pengolahan ikan, membawa dampak positif terhadap daya serap pasar akan hasil tangkapan di TPI Muncar.